

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian di Badan Pusat Statistik Kota Banjar tentang “**Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar)**” maka hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Dampak pemekaran terhadap kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar dan aspek sosial dan administratif wilayah di Kota Banjar Tujuan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kota Banjar, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kinerja pemerintah daerah seringkali diukur berdasarkan sejauh mana peningkatan kesejahteraan masyarakat telah tercapai dan pelayanan apa yang telah diberikan. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan di kota tersebut. Kota Banjar memegang peran strategis sebagai pintu gerbang utama jalur lintas Selatan Jawa Barat. Sebagai daerah yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya, Banjar memainkan peran penting dalam arus perpindahan barang dan manusia di bagian selatan Pulau Jawa.
2. Peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pasca pemekaran daerah di Kota Banjar, kejelasan pemerintah terhadap pelayanan Masyarakat. Komponen Pemerintah Dalam Pendidikan modal dasar untuk mencetak generasi yang produktif dan berkualitas, karena itu pendidikan adalah investasi terbesar bagi suatu bangsa. UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. “ Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan “. Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah “Banjar Semakin Berseri menuju Agropolitan”. Kata “Berseri

menuju Agropolitan” pada slogan tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok Visi, yaitu: bersih, sejahtera, dan asri, agropolitan.

3. Tinjauan Fiqih Siyasa dalam konteks pemekaran wilayah dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam: Kedudukan pemimpin dalam Islam dapat dibandingkan dengan peran seorang wali terhadap anak yatim, menunjukkan bahwa pemimpin diharapkan membuat keputusan sesuai dengan keinginan rakyat. Konsep hukum masalah mursalah dalam Islam mencerminkan ide bahwa tindakan pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan, seperti yang dapat terlihat dalam pemekaran wilayah yang memberikan manfaat lebih besar daripada kerugian. Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah (2:30), menyajikan ajaran dan petunjuk mengenai pemerintahan, menegaskan kebutuhan akan khalifah yang menjalankan tugasnya dengan adil. Dalam Fiqih Siyasa, prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, ketaatan, dan musyawarah menjadi dasar penting dalam pemerintahan Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait yang terkait dalam Dampak Pemekaran Terhadap Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banjar

1. Perlu diupayakan oleh pemerintah untuk menggalakkan program-program yang dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat mandiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan, serta merangsang penciptaan lahan kerja baru guna menyerap angka pertumbuhan pencari kerja setiap tahunnya.
2. Diperlukan pembinaan dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang beroperasi di sektor informal.
3. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tenaga kerja, melibatkan peningkatan mutu, penyesuaian upah, dan peninjauan regulasi ketenagakerjaan. Tenaga kerja juga diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya untuk dapat bersaing dan menyesuaikan diri di era digital di dunia kerja.

4. Tenaga kerja perlu menunjukkan kreativitas dan inovasi agar dapat menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang baru.

